



Analisis Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Evaluasi Pendidikan: Tinjauan Kritis terhadap Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Ahmad Mujib¹, Achmad Rasyid Ridha²

^{1,2}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

Email : mujibahmad548@gmail.com , ahmadrosyeed@gmail.com

Abstract

Evaluation is a crucial component in education delivery because it measures the achievement of learning objectives and serves as the basis for decision-making to improve educational quality. One evaluation instrument used for many years in the Indonesian education system is the Minimum Completion Criteria (KKM). This study aims to analyze the concept, function, implementation, and relevance of the KKM in developing evaluations of Islamic Religious Education (PAI), particularly during the transition to the Learning Objective Achievement Criteria (KKTP) in the Independent Curriculum. The study used a qualitative approach with library research, reviewing various scientific journals, books, and regulations related to educational evaluation. The results indicate that the KKM plays a strategic role as a minimum standard for student competency achievement and serves as a reference for implementing remedial and enrichment programs. However, the implementation of the KKM still faces various obstacles, such as an overemphasis on numerical scores, differences in standards between schools, and the inability to comprehensively describe student competencies, particularly in the affective and psychomotor aspects. In the context of Islamic Religious Education, learning evaluation should not only focus on cognitive aspects but also measure character development, spirituality, and the practice of Islamic values. Therefore, the transformation from Minimum Competency Criteria (KKM) to Minimum Competency Criteria (KKTP) is a more relevant step in realizing an evaluation system that is authentic, flexible, and oriented toward holistic student competency development.

Keywords: Minimum Competency Criteria, educational evaluation, Islamic Religious Education, Minimum Competency Criteria (KKTP), Independent Curriculum.

Abstrak

Evaluasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu instrumen evaluasi yang selama bertahun-tahun digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, fungsi, implementasi, serta relevansi KKM dalam pengembangan evaluasi Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya pada masa transisi menuju Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dalam Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KKM memiliki peran strategis sebagai standar minimal pencapaian kompetensi peserta didik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan remedial maupun pengayaan. Namun demikian, implementasi KKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti orientasi yang terlalu menitikberatkan pada pencapaian nilai numerik, perbedaan standar antar sekolah, serta belum mampu menggambarkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, terutama pada aspek afektif dan psikomotorik. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, evaluasi

pembelajaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mampu mengukur perkembangan karakter, spiritualitas, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, transformasi dari KKM menuju KKTP menjadi langkah yang lebih relevan dalam mewujudkan sistem evaluasi yang autentik, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik.

Kata Kunci: Kriteria Ketuntasan Minimal, evaluasi pendidikan, Pendidikan Agama Islam, KKTP, Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas proses pendidikan. Melalui evaluasi, pendidik dapat memperoleh informasi mengenai keberhasilan pembelajaran, efektivitas metode yang digunakan, serta perkembangan kompetensi peserta didik. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu pendidikan yang berkelanjutan (Arifin, 2020).

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, salah satu instrumen evaluasi yang telah lama digunakan adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM merupakan standar minimum yang harus dicapai peserta didik sebagai indikator ketuntasan belajar pada setiap kompetensi dasar atau capaian pembelajaran tertentu. Penetapan KKM dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas materi, kemampuan awal peserta didik (*intake*), serta daya dukung satuan pendidikan, sehingga setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar ketuntasan sesuai dengan kondisi masing-masing (Mulyasa, 2018).

Penerapan KKM memberikan sejumlah manfaat dalam proses pembelajaran, di antaranya menjadi acuan bagi guru dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik, dasar pelaksanaan program remedial dan pengayaan, serta alat monitoring terhadap mutu pembelajaran. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Penilaian sering kali lebih berorientasi pada pencapaian nilai numerik dibandingkan penguasaan kompetensi secara menyeluruh. Selain itu, adanya perbedaan standar KKM antar sekolah menyebabkan kesenjangan dalam penentuan ketuntasan belajar sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kompetensi peserta didik secara objektif (Wahyuni & Ibrahim, 2022).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Tujuan utama PAI tidak hanya membentuk kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga mengembangkan dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tercermin dalam perilaku

sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran PAI tidak cukup diukur melalui tes tertulis atau pencapaian nilai akademik semata, melainkan juga melalui kemampuan peserta didik dalam menginternalisasi serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata (Muhaimin, 2019).

Perubahan paradigma evaluasi semakin terlihat melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang memperkenalkan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) sebagai pengganti KKM. Berbeda dengan KKM yang berorientasi pada batas minimal nilai, KKTP lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi secara bertahap sesuai karakteristik dan perkembangan peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *assessment for learning* yang menempatkan evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sekadar penentu hasil akhir (Kemendikbudristek, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian kritis mengenai implementasi KKM dalam evaluasi pendidikan, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan penerapan KKM sekaligus mengkaji relevansinya terhadap transformasi sistem evaluasi menuju KKTP dalam Kurikulum Merdeka. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem evaluasi PAI yang lebih autentik, komprehensif, dan berorientasi pada pembentukan kompetensi peserta didik secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, implementasi, serta perkembangan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam evaluasi pendidikan, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan dan transformasi sistem penilaian menuju Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep evaluasi pendidikan, penetapan KKM, implementasi penilaian dalam Pendidikan Agama Islam, serta kebijakan Kurikulum Merdeka mengenai KKTP. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep dan Hakikat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem evaluasi pendidikan di Indonesia yang berfungsi sebagai standar minimal pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran. Selama bertahun-tahun, KKM menjadi acuan bagi pendidik dalam menentukan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penetapan KKM tidak hanya berfungsi sebagai batas kelulusan suatu kompetensi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan program remedial dan pengayaan guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan demikian, KKM memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya sistem evaluasi yang sistematis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (Mulyasa, 2018; Arifin, 2020).

Secara konseptual, KKM merupakan bentuk penerapan *criterion-referenced assessment*, yaitu sistem penilaian yang membandingkan capaian belajar peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya, bukan dengan capaian peserta didik lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan tanpa dipengaruhi oleh distribusi nilai kelompok. Menurut Nitko dan Brookhart (2014), penilaian berbasis kriteria memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat penguasaan kompetensi karena berorientasi pada indikator pembelajaran yang telah ditetapkan sejak awal proses pembelajaran.

Kompleksitas berkaitan dengan tingkat kesulitan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, sedangkan daya dukung mencakup ketersediaan sumber daya pembelajaran, seperti kompetensi guru, sarana dan prasarana, media pembelajaran, serta lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan. Adapun *intake* peserta didik menggambarkan kemampuan awal siswa berdasarkan hasil belajar sebelumnya maupun karakteristik akademik yang dimiliki. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam menentukan nilai KKM yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020).

Meskipun demikian, penerapan KKM di berbagai satuan pendidikan menunjukkan adanya variasi yang cukup besar. Perbedaan kondisi sekolah, kualitas sumber daya manusia, serta fasilitas pembelajaran menyebabkan nilai KKM antara satu sekolah dengan sekolah lainnya tidak selalu sama. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi sekolah untuk menetapkan standar yang sesuai dengan kondisi riil. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam standar ketuntasan belajar sehingga memengaruhi persepsi

masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan KKM sering kali dipengaruhi oleh faktor administratif dibandingkan hasil analisis yang komprehensif terhadap kemampuan peserta didik dan karakteristik pembelajaran (Prasetyo & Rahmawati, 2022).

Dalam perspektif evaluasi pendidikan modern, fungsi KKM tidak hanya sebagai alat untuk menentukan ketuntasan belajar, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan (*decision making*) dalam proses pembelajaran. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menjelaskan bahwa evaluasi yang baik harus menghasilkan informasi yang berguna bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran, bukan sekadar menghasilkan nilai akhir peserta didik. Oleh karena itu, hasil pencapaian KKM seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar refleksi bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan metode, media, maupun pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), hakikat KKM memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran PAI tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek pengetahuan (*cognitive domain*), tetapi juga membentuk sikap religius (*affective domain*) dan keterampilan beribadah (*psychomotor domain*). Oleh karena itu, indikator ketuntasan pembelajaran PAI tidak dapat diukur hanya melalui nilai tes tertulis, tetapi juga memerlukan berbagai bentuk penilaian autentik seperti observasi, penilaian praktik, portofolio, dan penilaian proyek. Muhaimin (2019) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tercermin dari kemampuan peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam perilaku sehari-hari, sehingga evaluasi harus mampu mengukur perubahan sikap dan karakter secara berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan paradigma pendidikan abad ke-21, konsep KKM mulai mengalami transformasi menuju sistem evaluasi yang lebih fleksibel melalui penerapan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dalam Kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi evaluasi dari sekadar pencapaian nilai minimum menuju pencapaian kompetensi secara utuh. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi hanya berfokus pada batas angka tertentu, tetapi juga memperhatikan perkembangan belajar peserta didik secara individual sesuai karakteristik dan kebutuhannya. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan perubahan dari *assessment of learning* menuju *assessment for learning*, yaitu evaluasi yang mendukung proses belajar dan memberikan umpan balik berkelanjutan bagi peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa KKM merupakan instrumen penting dalam sistem evaluasi pendidikan karena memberikan standar minimal yang jelas bagi pencapaian kompetensi peserta didik. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada ketepatan proses penetapan, kualitas instrumen penilaian, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penerapan KKM juga perlu diintegrasikan dengan penilaian autentik sehingga mampu mengukur perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan keagamaan.

Implementasi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Implementasi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian penting dari sistem evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh. KKM berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam menentukan ketuntasan belajar, menyusun program remedial, serta merancang kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui standar kompetensi. Dalam praktiknya, evaluasi tidak lagi dipandang sebagai proses pemberian nilai semata, tetapi juga sebagai sarana memperoleh umpan balik (*feedback*) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep asesmen autentik yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan peserta didik (Aisyah et al., 2024).

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, implementasi KKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan mata pelajaran lain karena tujuan pembelajaran PAI tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter religius, sikap spiritual, dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan peserta didik tidak cukup diukur melalui hasil tes tertulis, melainkan juga melalui perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, model evaluasi PAI diarahkan pada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang memberikan ruang lebih luas bagi guru untuk menilai perkembangan kompetensi peserta didik secara holistik (Rahayu & Istikomah, 2024).

Pada ranah kognitif, implementasi KKM dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, penugasan, presentasi, maupun proyek pembelajaran yang bertujuan mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban

Islam. Meskipun demikian, pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk tidak hanya mengukur kemampuan mengingat konsep, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan nyata. Evaluasi yang berorientasi pada kompetensi tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran (Aisyah et al., 2024).

Selain aspek kognitif, implementasi KKM dalam Pendidikan Agama Islam juga harus memperhatikan ranah afektif yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan sikap religius peserta didik. Penilaian afektif dilakukan melalui observasi terhadap perilaku siswa selama proses pembelajaran maupun di luar kelas, seperti kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan observasi, jurnal refleksi, penilaian diri (*self-assessment*), dan penilaian antarteman (*peer assessment*) mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan karakter peserta didik dibandingkan penilaian berbasis tes semata. Dengan demikian, asesmen afektif menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Aisyah et al., 2024).

Implementasi KKM pada ranah psikomotorik dilakukan melalui penilaian praktik ibadah, kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, praktik wudu, salat, hafalan doa, penyelenggaraan jenazah, dan berbagai keterampilan keagamaan lainnya. Penilaian praktik dilaksanakan menggunakan rubrik yang memuat indikator pencapaian kompetensi sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian menunjukkan bahwa asesmen berbasis kinerja (*performance assessment*) memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kemampuan peserta didik dibandingkan tes tertulis karena mampu mengukur keterampilan nyata dalam menerapkan materi yang telah dipelajari (Daud et al., 2025).

Keberhasilan implementasi KKM dalam Pendidikan Agama Islam sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam merancang instrumen evaluasi yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut mampu menyusun soal yang berkualitas, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengembangkan rubrik observasi, penilaian proyek, portofolio, serta asesmen praktik yang objektif dan berorientasi pada capaian kompetensi. Di sisi lain, berbagai kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi, seperti keterbatasan waktu, tingginya beban administrasi guru, serta kurangnya pelatihan mengenai penyusunan instrumen

asesmen autentik. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan (Rahayu & Istikomah, 2024).

Transformasi kebijakan pendidikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka membawa perubahan paradigma evaluasi dari KKM menuju Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Berbeda dengan KKM yang berorientasi pada batas nilai minimum, KKTP lebih menekankan ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan perkembangan individu peserta didik. Sistem ini memungkinkan guru memberikan umpan balik secara berkelanjutan melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak lagi sekadar menentukan ketuntasan belajar, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal (Rahayu & Istikomah, 2024; Aisyah et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi KKM dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki kontribusi penting dalam menjaga standar mutu pembelajaran sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan bagi guru dalam merancang tindak lanjut pembelajaran. Namun, perkembangan paradigma evaluasi pendidikan menunjukkan bahwa sistem penilaian yang efektif harus mampu mengintegrasikan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam perlu terus mengembangkan kompetensi dalam merancang asesmen autentik sehingga evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai pencapaian nilai, tetapi juga menggambarkan perkembangan karakter, spiritualitas, dan keterampilan peserta didik secara utuh (Aisyah et al., 2024; Daud et al., 2025).

KESIMPULAN

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan salah satu instrumen evaluasi yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia sebagai standar minimal pencapaian kompetensi peserta didik. Penetapan KKM didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu kompleksitas materi, daya dukung satuan pendidikan, dan kemampuan awal (*intake*) peserta didik. Melalui standar tersebut, guru memiliki acuan dalam menentukan ketuntasan belajar, menyusun program remedial dan pengayaan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), implementasi KKM memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan mata pelajaran lain karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur melalui penguasaan aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek

afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, evaluasi PAI memerlukan penggunaan berbagai instrumen penilaian, seperti tes tertulis, observasi, penilaian praktik, portofolio, dan proyek agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kompetensi peserta didik

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan KKM memberikan berbagai manfaat, antara lain menciptakan standar penilaian yang jelas, mendukung pelaksanaan program remedial, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Namun demikian, implementasi KKM juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti kecenderungan berorientasi pada pencapaian nilai numerik, adanya perbedaan standar antar satuan pendidikan, serta belum sepenuhnya mampu menggambarkan kompetensi peserta didik secara utuh. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi pembelajaran sering kali belum mampu mengukur perkembangan karakter, spiritualitas, dan keterampilan peserta didik secara optimal

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan evaluasi Pendidikan Agama Islam pada masa mendatang perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip penilaian autentik, memanfaatkan asesmen formatif secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan implementasi KKTP agar sistem evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). *Evaluasi pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). *Pedoman penilaian hasil belajar Pendidikan Agama Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Habibi, M. W. (2026). *KOMPETENSI INTERNET OF THINGS (IOT) PENDIDIKAN VOKASI: Teori, Pembelajaran, dan Implementasi*. Penerbit KBM Indonesia.
- Khaer, M. Z., & Pramono, A. J. B. (2025). *Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pada Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. (2019). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2014). *Educational assessment of students* (7th ed.). Pearson.
- Puspitasari, W., Hamengkubuwono, H., Mutia, M., & Warsah, I. (2020). Implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(1), 66-90.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Sulfaningsih, E., Djakfar, M. Z. R., Sahra, S., Anggraini, A., Haramain, I. R., & Purnawati, R. T. (2026). IMPLEMENTASI ASESMEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN RINGINSARI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 224-243.
- Widyanti, E., Wahyuningsih, S., & Halim, A. (2025). Penerapan Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Muara Wahau. *Jurnal Tarbiyah Kalimantan*, 2(1), 1-10.